

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA
MASYARAKAT (BLSM) TAHUN 2013 DI KELURAHAN
KAMPUNG BARU KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT

Naskah Publikasi



Oleh

NURMIZA
SURADJI
WAYU EKO YUDIATMAJA

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2014

SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang disebut dibawah ini :

Nama : Nurmiza
NIM : 100563201268
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 16
Nomor Telp. : 085363722172
Email : nurmiza81@yahoo.com
Judul Naskah : IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
SEMMENTARA MASYARAKAT (BLSM) TAHUN 2013 DI
KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN
TANJUNGPINANG BARAT

Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan.

Tanjungpinang, Oktober 2014

Yang menyatakan,

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Suradji, M.Si

NIDN. 1029127803

Wayu Eko Yudiatmaja, S.IP, MPA

NIP. 198707012012121002

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA
MASYARAKAT (BLSM) TAHUN 2013 DI KELURAHAN
KAMPUNG BARU KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT

Nurmiza nurmiza81@yahoo.com

Suradji dosengo_blog@yahoo.com

Wayu Eko Yudiatmaja wayuguci@yahoo.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi program BLSM. Melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2013 dan Instruksi Mendagri Nomor 541/3150/SJ/Tahun 2013, pemerintah memberikan bantuan subsidi BBM. Program BLSM diberikan kepada masyarakat miskin karena kenaikan harga BBM, dengan tujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan terjun langsung ke lapangan.

Setelah dilakukan penelitian, hasil akhir dari penelitian ini adalah pelaksanaan program BLSM di Kelurahan Kampung Baru berjalan dengan lancar. Meskipun, ada beberapa masalah teknis dalam pelaksanaan program BLSM. Masalah utama dalam program BLSM adalah sumber data yang digunakan tahun 2011, selang waktu antara sumber data dengan pelaksanaan program memungkinkan terjadinya perubahan kondisi sosial di lingkungan masyarakat. Sehingga, dampak yang ditimbulkan dalam program BLSM adalah menjadi tidak tepat sasaran, dan adanya kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat.

Adapun saran yang peneliti berikan adalah penggunaan data yang terbaru pada saat akan dilaksanakannya suatu program bantuan kepada masyarakat. Selain itu, bantuan yang diberikan kepada masyarakat seharusnya bersifat jangka panjang, dan mendidik masyarakat untuk mandiri. Sehingga tidak adanya kekhawatiran masyarakat setelah program berakhir. Melakukan pengendalian terhadap harga-harga dipasaran agar tetap stabil dan terjangkau untuk masyarakat menengah kebawah.

Kata kunci : Implementasi program, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA
MASYARAKAT (BLSM) TAHUN 2013 DI KELURAHAN
KAMPUNG BARU KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT

Nurmiza nurmiza81@yahoo.com

Suradji dosengo_blog@yahoo.com

Wayu Eko Yudiatmaja wayuguci@yahoo.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

This research the Implementation of the Bantuan Langsung Sementara Masyarakat in the Kelurahan Kampung Baru subdistrict Tanjungpinang Barat. The purpose of this study are to analyze the implementation of the program BLSM. Through Inpres No. 5 year 2013 and the Instruction Mendagri No. 541/3150 / SJ/ In 2013, the government provides assistance subsidies. BLSM program given to the poor due to increase in fuel prices, with the aim of helping people to meet their daily needs. This study used a qualitative descriptive method, by plunging directly into the field.

After doing research, the end of the result of this research is the implementation of the program in the Village of Kampung Baru BLSM running smoothly. Although, there are some technical problems in the implementation of the program BLSM. The main problem in BLSM program are a source of data used in 2011, the time interval between the data source with the implementation of the program may change the social conditions in the community. Thus, the impact of the program is BLSM be right on target, and the presence of jealousy within the community.

As for the suggestion of the researchers give is the use of the latest data at the time of execution of a program will help to the community. In addition, assistance is provided to the public should be long term, and educating people to be independent. Avoiding the nature of cash assistance, because it will not be effective in the use of money within the receiver. So it was no concern of the community after the program ends. Exercise control over market prices to remain stable and affordable for middle class society.

Keywords: Implementation of the program, Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi yang menyatakan upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Begitu jelas tertuang dalam amanat konstitusi, kemiskinan adalah masalah bangsa yang harus diselesaikan secara bersama.

Rapat paripurna DPR pada tanggal 17 Juni 2013 akhirnya mengesahkan APBN-P2013 terkait rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan keputusan tersebut, harga premium menjadi Rp. 6.500 dan solar Rp. 5.500 per liter (www.tempo.com). Pemerintah memperkirakan kenaikan harga BBM menyebabkan ada penambahan orang miskin sebesar 4 juta jiwa. Harga BBM yang mengalami kenaikan menimbulkan kenaikan di bidang jasa, transportasi, harga bahan pokok, dan biaya-biaya lainnya. Hal ini tentunya akan menjadi permasalahan baru dalam penanggulangan kemiskinan yang semakin meningkat.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau sekarang yang sudah berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah kita untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan di Indonesia.

Sebagai solusi yang ditawarkan mengatasi dampak kenaikan BBM bagi masyarakat miskin, 15,5 juta rumah tangga dibagikan BLSM dengan besaran bantuan Rp 150.000 ribu perbulan. Pemerintah harus memikirkan ulang kembali terkait dengan penyaluran dana BLSM dengan menggunakan data yang akurat. Kesejahteraan merata dijamin oleh negara sebagaimana dalam Pasal 34 UUD 1945 menyebutkan, "Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Maksudnya, orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak. Negara berkewajiban memberikan bantuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Tujuan dari program BLSM adalah: 1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya; 2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi; 3) Meningkatkan tanggungjawab sosial bersama. Kebijakan pemerintah menaikkan harga dasar BBM, secara langsung akan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat. Meningkatnya harga bahan pokok sebagai salah satu akibat langsung dari kenaikan harga BBM, akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga di pasar.

Program BLSM diberikan kepada seluruh provinsi di Indonesia dengan total

Rumah Tangga Sasaran (RTS) 15.530.897 yang tersebar seluruh Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Kepulauan Riau terdapat 64.732 masyarakat miskin yang akan menerima bantuan dana BLSM. Semua tersebar di seluruh Kabupaten/Kota yang ada. Untuk Kelurahan Kampung Baru sendiri, terdapat 336 masyarakat miskin yang terdaftar sebagai penerima BLSM berdasarkan BDT (Sumber : Dinas Sosial 2013).

Pelaksanaan BLSM rentan dengan masalah, Basis Data Terpadu (BDT) merupakan sumber data untuk diterbitkannya Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Basis data yang dipakai dalam program ini merupakan data tahun 2011. Rentang waktu pelaksanaan dan sumber data pastinya menimbulkan perubahan status sosial ekonomi di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data yang dipakai dengan kondisi aktual. Perbedaan ini dapat menyebabkan mereka yang berhak menerima justru tidak terdaftar sebagai penerima. Kemungkinan lainnya, adalah rumah tangga yang sudah pindah alamat, atau seluruh keluarganya sudah meninggal. Salah satu daerah yang merasakan langsung program ini adalah Kelurahan Kampung Baru.

Selain sumber data yang digunakan, hal menarik lainnya adalah proses penentuan penerima program BLSM. Proses penentuan tidak dilakukan oleh BPS yang ada di daerah, melainkan penentuan penerima dilakukan langsung oleh pemerintah pusat melalui TNP2K. Ironinya lagi, pihak daerah khususnya BPS tidak mengetahui metode

seperti apa yang digunakan dalam penentuan penerima program BLSM. BPS daerah tidak terlibat dalam hal penentuan penerima program BLSM, melainkan hanya sebagai penyedia keranjang data.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di lapangan, ditemukan keluarga/rumah tangga yang mampu menerima BLSM (*leakage*). Selain itu, ditemukan juga rumah tangga yang miskin tetapi tidak menerima dana BLSM tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa, terjadinya salah sasaran penerima program BLSM di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat. Masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan dikarenakan tidak terdaftar dalam BDT. Sedangkan masyarakat katagori mampu yang menerima BLSM disebabkan karena terjadi perubahan status sosial ekonomi.

Koordinasi merupakan hal yang penting dalam kelancaran program yang melibatkan banyak instansi. Koordinasi antara lembaga yang berwenang dalam program BLSM harus dijalin dengan baik. Salah satu cara dengan diadakan rapat koordinasi yang mengundang seluruh instansi terkait sampai tingkat yang paling bawah. Rapat koordinasi sekaligus dapat dijadikan sebagai tempat untuk mensosialisasikan program BLSM. Namun, hal tersebut tidak dilakukan, koordinasi dan sosialisasi masih kurang dalam program BLSM.

Sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas formal saja, sosialisasi tidak dilakukan untuk masyarakat luas, tokoh

masyarakat, lembaga musyawarah desa/kelurahan. Sebagai contoh, kriteria penerima BLSM tidak disosialisasikan secara terbuka, bahkan instansi pemerintah tingkat kelurahan secara resmi tidak mengetahuinya.

Dalam pelaksanaan program ini tidak ditemukannya acuan atau pedoman umum yang berisi penjelasan menyeluruh tentang program bagi semua pihak yang berkepentingan. Acuan yang tersedia hanyalah buku pedoman pelaksanaan BLSM yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Buku pedoman ini persebarannya cenderung terbatas dikalangan pelaksana, Kelurahan Kampung Baru tidak mendapatkan buku pedoman yang disediakan oleh Kementerian Sosial.

Selain permasalahan tersebut, tidak adanya aturan jelas tentang penggunaan dana BLSM, membuat penerima menggunakan uang tersebut untuk keperluan yang dikehendakinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Tahun 2013 di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat”**.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

”Bagaimana Implementasi Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Tahun 2013 di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat?”.

Tujuan Penelitian

“Menganalisis Implementasi Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Tahun 2013 di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat”.

Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara akademik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan dan mengembangkan, serta sebagai rujukan bagi peneliti terhadap teori yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Kegunaan secara praktis Diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut program BLSM ke masyarakat, di masa yang akan datang.

KONSEP TEORITIS

Kamus Webster (Tachjan, 2006: 23), merumuskan secara singkat bahwa *to implemen* (mengimplementasikan) berarti *to*

provide the means for carrying out (menyediakan sarana dan untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan yang biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, dan lain sebagainya.

Pressman dan Wildavsky dalam Wahab (2004: 65) menyatakan “Bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepiantasnya terkait langsung kata benda kebijaksanaan”. Sehingga bagi kedua pelopor studi implementasi ini maka proses untuk melaksanakan kebijaksanaan perlu mendapatkan perhatian yang seksama, dan oleh sebab itu adalah keliru kalau kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus.

Jika pandangan tersebut kita pahami, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2004: 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa:

” Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk

menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Menurut Grindle (Ali dkk, 2012: 95), menjelaskan bahwa, “Terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*)”. Kedua hal tersebut harus didukung dengan program aksi dan proyek individu yang didukung yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan. Sehingga dalam kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, serta perubahan dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang dilaksanakan.

Kedua variabel besar tersebut terdiri dari indikator-indikator, adalah sebagai berikut :

- a. Isi kebijakan ini mencakup (*content of policy*)
 - 1) Kepentingan yang dipengaruhi
 - 2) Tipe manfaat
 - 3) Derajat perubahan yang diharapkan
 - 4) Letak pengambilan keputusan
 - 5) Pelaksana program
 - 6) Sumber daya yang dilibatkan
- b. Lingkungan kebijakan (*context of implementation*)
 - 1) Kekuasaan, strategi aktor yang terlibat
 - 2) Karakteristik lembaga dan penguasa
 - 3) Kepatuhan dan daya tanggap

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian tentang program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat

menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiono (2003: 11), "Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami (natural), dan peneliti menjadi instrumen kunci serta hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dari yang diteliti, dari pada menggeneralisasikan obyek penelitian".

Moleong (2002: 5) menjelaskan "Metode penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi lapangan, lebih peka terhadap perubahan pola/nilai dan bahkan data yang ada di lapangan". Kemudian untuk mempertajam gambaran terhadap fenomena yang diteliti, maka interpretasi langsung dari fenomena/kejadian yang terjadi dilingkungan objek penelitian. Teori dalam penelitian kualitatif tidak semata-mata dimaksudkan untuk dibuktikan (*verification*), namun dapat saja untuk dikembangkan berdasarkan data yang dikumpulkan (*falsification*). Dengan demikian penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002: 2).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena adanya tuntutan masyarakat agar

pelaksanaan program BLSM di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat dilaksanakan berdasarkan mekanisme pelaksanaan program yang sudah ditetapkan Kementerian Sosial RI. Serta terdapatnya penerima yang dikategorikan mampu, dan masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan BLSM

Jenis Data

- a. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah masyarakat penerima dana BLSM. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari pihak lain) yang pada umumnya berupa bukti, catatan yang telah tersusun dalam arsip (dokumenter), baik yang dipublikasikan atau tidak. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur-literatur dan data kemiskinan, verifikasi terhadap Rumah Tangga

Sasaran (RTS) pengganti yang ada di Kelurahan Kampung Baru.

Responden

Responden peneliti adalah orang yang benar-benar mengetahui atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian, baik pengetahuan ataupun keterlibatan mereka dengan permasalahan. Jumlah yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditetapkan, proses penelitian berlangsung dari satu responden ke responden lainnya sehingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 9 orang, terdiri dari 1 orang Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang, 1 orang dari Kantor Lurah Kampung Baru, 1 orang dari Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, 1 orang dari PT Pos Tanjungpinang, dan 5 orang masyarakat penerima BLSM di Kelurahan Kampung Baru.

Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Merupakan pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara langsung kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Alat yang digunakan pada saat observasi adalah daftar ceklist.

b. Wawancara

Merupakan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh informasi atau masukan juga yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, dengan menanyakan garis besar dari permasalahan yang akan diteliti. Alat yang digunakan dalam wawancara adalah pedoman wawancara dan *tape recorder*.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan meminta data-data tertulis kepada pihak yang menjadi objek penelitian, sebagai bahan untuk melengkapi penelitian. Alat untuk dokumentasi yang digunakan adalah kamera *hanphone*.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2003: 246) mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya

sudah jenuh”. Aktifitas dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi Data

Merupakan bagian dari analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat membuat kesimpulan akhir. Mengambil inti dari data yang diperoleh dengan menghilangkan hal-hal yang tidak tepat seperti penggunaan angka atau kata-kata yang berulang-ulang.

b. Sajian Data

Merupakan suatu rangkaian informasi, deskriptif dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu kepada rumusan masalah sehingga dapat menjawab masalah yang diteliti, dengan menghubungkan fenomena yang ditemukan dengan teori dan penelitian terdahulu.

c. Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, arahan, sebab-akibat dan berbagi porposi, kesimpulan perlu diverifikasi agar penelitian yang dilakukan benar dan bisa dipertahankan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis pelaksanaan program BLSM di Kelurahan Kampung Baru, penulis mengacu kepada teori yang dikemukakan oleh Grindle (Ali dkk, 2012: 95). Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :

1) Isi Kebijakan

Isi kebijakan yang dimaksud disini adalah hal-hal yang terkait dalam konteks kebijakan.:

a. Pihak penerima/ *target groups* program BLSM

BLSM merupakan bantuan untuk mempertahankan daya beli rumah tangga miskin dan rentan agar terlindung dari dampak kenaikan BBM. Sasaran program BLSM adalah 15,5 juta rumah tangga. BPS menyampaikan data kepada TNP2K untuk diolah sehingga menghasilkan 25% rumah tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan, R1, R2, R3 dan R4, selaku instansi yang terlibat, dapat disimpulkan bahwa :

“Penerima program BLSM adalah masyarakat dengan perekonomian terendah. Mereka dipilih oleh BPS dengan menggunakan 14 kriteria rumah tangga miskin yang ada. Mereka inilah yang merasakan dampak kenaikan BBM dan membutuhkan dana subsidi dari pemerintah”.

Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, penerima sendiri tidak mengetahui kriteria penerima BLSM secara jelas, mereka mengetahui mendapatkan bantuan setelah KPS dibagikan. Ditemukannya juga penerima yang sudah mampu yang menerima BLSM, dan masyarakat yang tergolong miskin tidak menerima BLSM. Selain itu, pihak daerah dalam hal ini kelurahan tidak terlibat dalam penentuan sasaran dari program BLSM.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, sehingga dapat dilakukan analisis untuk indikator sasaran/ *target groups* kebijakan program BLSM adalah masyarakat miskin dan rentan. Namun, tidak ditemukannya secara jelas cara atau metode yang digunakan dalam penentuan kelompok sasaran program. Penentuan penerima dilakukan berdasarkan data PPLS tahun 2011, penentuan penerima BLSM dilakukan oleh pemerintah pusat melalui TNP2K secara keseluruhan, termasuk penerima dana BLSM di tingkat Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjngpinang Barat.

Jika dilihat dari sudut pandang Grindle (Ali dkk, 2012: 95), hal yang utama dalam isi kebijakan adalah sasaran dari kebijakan. Menentukan sasaran secara tepat

menjadi hal yang utama yang harus dilakukan agar tepat sasaran. Terjadinya salah sasaran dalam program BLSM merupakan hal yang kurang diperhitungkan oleh pelaksana kebijakan. Masih adanya penerima dana subsidi yang belum tepat sasaran ditemukan juga dalam penelitian yang dilakukan Hasbi Iqbal (2008) tentang Implementasi Kebijakan Program BLT Tahun 2008 di Kabupaten Kudus.

b. Jenis manfaat yang diperoleh

Jenis manfaat yang dituangkan dalam isi kebijakan disesuaikan dengan latar belakang dalam pengambilan kebijakan.

Berdasarkan observasi dilapangan yang penulis lakukan, ditemukannya penerima BLSM yang menggunakan uang subsidi untuk keperluan membayar uang sekolah dan tambahan modal dan membayar hutang. Uang tunai senilai Rp. 300.000 dapat meringankan beban mereka terhadap biaya pendidikan untuk satu bulan kedepan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang peneliti lakukan dapat dianalisis bahwa, tujuan dari program BLSM untuk membantu masyarakat memenuhi kehidupannya dapat terealisasi.

Namun, ditemukannya penggunaan uang tidak sesuai dengan tujuan dari program BLSM. Pada kenyataannya, masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Grindle (Ali dkk, 2012: 95), implementasi harus mengacu kepada tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang akan dicapai akan dilihat dalam proses implementasi, harus mencapai target yang diinginkan. Dalam hal ini, tujuan dari program dapat tercapai dengan manfaat uang yang dapat dirasakan oleh penerima bantuan. Penelitian yang dilakukan Lembaga Penelitian SMERU (2011) tentang, “Kajian Cepat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia”. Program BLT juga memberikan manfaat yang sama dalam membantu perekonomian masyarakat setelah kenaikan BBM.

c. Perubahan yang diharapkan

Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam mengatasi suatu masalah tentunya mempunyai tujuan dan perubahan yang diharapkan dengan dibuatnya kebijakan. Perubahan yang diharapkan dalam program BLSM pastinya perubahan dari daya

beli masyarakat setelah kenaikan BBM.

Observasi di lapangan yang peneliti lakukan, terlihat jelas bantuan BLSM memberikan perubahan. Perubahan terlihat dari kekhawatiran akan kesulitan dalam membeli barang kebutuhan hidup, apalagi harga dipasaran juga melonjak naik, semua ini terbantu dengan bantuan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan tersebut dapat dianalisis bahwa Indikator perubahan yang diharapkan dapat dirasakan oleh sasaran program. Perubahan tersebut tampak pada daya beli masyarakat yang bertahan karena kenaikan BBM. Sebagai masyarakat tingkat perekonomian rendah, kenaikan BBM tentunya menimbulkan kekhawatiran dalam memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, daya beli masyarakat akan kembali turun setelah program BLSM berakhir. Masyarakat kembali mengalami kekhawatiran terhadap harga kebutuhan pokok dipasaran yang tidak stabil.

d. Kedudukan pengambilan keputusan

Kedudukan pengambilan keputusan disini adalah pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan yang

berhubungan dengan pelaksanaan program.

Pada saat observasi lapangan yang penulis lakukan ke lokasi penelitian. Pihak kelurahan tidak bisa memberikan informasi jelas tentang pengambilan keputusan siapa yang menerima program BLSM. Karena ini program pusat, penentuan penerima program tidak dikembalikan ke daerah, maka daerah tidak berperan dalam penentuan sasaran program.

Melalui hasil wawancara dan observasi lapangan yang sudah dilakukan peneliti, dapat dianalisis bahwa pengambilan keputusan penerima BLSM yang mempunyai wewenang dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Pendataan dilapangan untuk mencacah seluruh karakteristik rumah tangga sasaran dilakukan oleh BPS. Namun, dari data yang dikimkan oleh BPS dipotong menjadi 25% rumah tangga miskin. Pastinya 15% sisanya masih banyak masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan. Peran pemerintah daerah dalam hal ini kelurahan tidak terlibat dalam penentuan penerima program, seharusnya kelurahan harus dilibatkan.

e. Pelaksana program

Pelaksana program disini adalah instansi-instansi yang terlibat dalam

pelaksana program. Dalam indikator pelaksana program yang dilihat adalah koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh instansi. Salah satu koordinasi dalam pembagian KPS, merupakan hal yang penting untuk menunjang keberhasilan program

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, pihak RT dan RW sendiri tidak mengetahui masalah penerima BLSM. RT dan RW hanya menyampaikan kartu yang diterima dari PT Pos ke masyarakat yang tercantum berdasarkan alamatnya.

Dalam pembagian KPS yang dilakukan oleh PT pos selaku pihak yang bertanggung jawab, PT Pos tidak melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan. Padahal, dengan melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan akan lebih membantu dalam pendistribusian KPS.

Lembaran sosialisasi yang dibagikan kepada penerima BLSM. Lembaran yang berisikan pemberitahuan tentang mekanisme penyaluran BLSM dan penggunaan KPS untuk program Raskin.

Melalui lembaran tersebut disampaikan bahwa bantuan yang diberikan hanya untuk masyarakat miskin, jika ada masyarakat yang sudah merasa mampu, maka kartu bisa dikembalikan melalui kelurahan.

Di kelurahan Kampung Baru sendiri sosialisasi secara formal tidak dilakukan, sosialisasi sudah dilakukan oleh PT Pos pada waktu pembagian kartu KPS. Selain itu, sosialisasi sudah dilakukan secara nasional melalui media elektronik. Namun, sosialisasi tersebut masih banyak yang belum sampai kepada masyarakat. Hal ini, membuat penerima bantuan ada yang kurang memahami tentang pelaksanaan program BLSM.

Pada saat peneliti melakukan observasi lapangan, penerima tidak mengambil KPS di kelurahan, melainkan diantar langsung oleh petugas. Namun, mereka tidak mengetahui petugas dari mana, mereka mengira petugas kelurahan yang mengantarkan KPS tersebut. Selain itu, peneliti juga menemukan KPS yang tidak sampai ketangan penerima dan dipegang oleh ketua RT dan tidak dikembalikan kepada pihak Pos.

Meskipun demikian, persoalan dilingkungan masyarakat yang kurang memahami masalah pelaksanaan BLSM bisa diatasi. Pihak RT dan RW memberikan penjelasan kepada masyarakatnya.

Keberhasilan sosialisasi adalah jika penerima manfaat program seharusnya menerima informasi yang berkaitan dengan program dengan benar. Sehingga penerima

manfaat tidak dibuat bingung, resah akibat ketidaktahuan mereka terhadap pelaksanaan program.

Selain pembagian KPS, kantor pos juga mempunyai tugas sebagai penyalur dana bantuan. Pencairan dana oleh penerima dapat dilakukan melalui kantor pos atau tempat tertentu yang sudah ditetapkan. Dalam proses pencairan dana berjalan dengan lancar, tempat-tempat pencairan yang sudah ada akan di tetapkan petugas kantor Pos didampingi RT/RW. Pelaksanaannya berjalan dengan tertib, tidak tampak antrian yang panjang. Tempat-tempat tersebut tersebar di masing-masing RW dengan waktu pencairan yang berbeda-beda.

Melalui hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan, dapat di analisis bahwa koordinasi secara keseluruhan pelaksana program BLSM dinilai masih kurang. Sosialisasi sendiri juga masih kurang, hal ini karena kurangnya sosialisasi di forum resmi.

Selain itu kurangnya komitmen pelaksana sosialisasi, informasi yang diterima tidak lengkap dan tidak sampai kepada masyarakat.

Seharusnya koordinasi dan sosialisasi lebih ditingkatkan baik forum resmi ataupun tidak resmi. Agar pemahaman instansi dan

penerima program lebih mengetahui tentang program yang diadakan. Hal ini merupakan keberhasilan implementasi program seperti yang dikemukakan oleh Grindle (Ali dkk, 2012: 95), dan juga Edwards III (Nugroho, 2012: 693). Koordinasi dan sosialisasi akan memberikan tanggapan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan.

Masalah koordinasi dan sosialisasi masih dinilai kurang merupakan masalah yang sering sekali terjadi dalam pelaksanaan kebijakan, salah satunya penelitian Hasbi Iqbal (2008) dengan judul “Implementasi Kebijakan Program bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus”.

f. Sumberdaya yang dilibatkan

Sumber yang sediakan disini adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusia menjadi kunci pokok keberhasilan implementasi kebijakan.

Hasil wawancara penulis dengan informan R1, R2, R3, dan R4 dapat disimpulkan bahwa :

“Penyediaan sumber daya manusia di nilai masih kurang. Sumber daya yang terlibat tidak berperan aktif dalam pelaksanaan program, karena kurangnya tingkat pemahaman terhadap pelaksanaan program”.

Kurangnya sumber daya manusia dapat dilihat dalam

pembagian kartu KPS. Hal yang sama diperjelas oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan R4 adalah sebagai berikut :

“Walaupun kami kekurangan sumber daya, kami pun merekrut tenaga kontrak yang sifatnya kami ikat secara kontrak, berarti ada perjanjian kerjasama yang diatur sebagai pegawai, karena kami sebagai pemegang kendali”.

Observasi yang peneliti lakukan dilapangan, dapat menunjukkan bahwa pemahaman sumber daya manusia dalam program BLSM masih kurang. Semua ini dapat dilihat ketika peneliti menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan program BLSM kepada beberapa instansi terkait, mereka tidak memahami secara keseluruhan mekanisme pelaksanaan program BLSM.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal yang peneliti lakukan dapat di analisis bahwa penyediaan sumber daya manusia masih kurang, hal ini diperparah dengan kurang memahaminya pihak instansi yang terkait terhadap mekanisme pelaksanaan program BLSM.

Meskipun kekurangan sumber daya manusia dan masih rendahnya pemahaman terhadap pelaksana, program BLSM masih bisa berjalan lancar. Seharusnya penyediaan sumber daya manusia harus mencukupi agar pelaksanaan

program bisa lebih efektif dan efisien.

2) **Lingkungan implementasi**

Konteks dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut diimplementasikan juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya, karena seberapa baik dan mudahnya kebijakan dan seberapa dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya.

Konteks implementasi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Sosial, program yang BLSM sendiri merupakan program dari pemerintah pusat.

Implementor dalam program BLSM terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Implementor pada tingkat daerah sampai kepada tingkat kelurahan. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan program berjalan lancar dan sasaran yang sesuai dengan isi dari kebijakan.

Dalam hal ini, akan melihat sejauh mana peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menentukan penerima program. Berdasarkan hasil wawancara

peneliti dengan R1, R2, R3, dan R4 dapat disimpulkan sebagai berikut :

“Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan penuh dalam menentukan sasaran program BLSM. Penentuan penerima program tidak melibatkan pemerintah daerah, pemerintah daerah hanya sebagai koordinator pelaksana program di tingkat daerah”.

Pemerintah daerah melalui BPS daerah hanya menyediakan data mentah yang akan diserahkan kepada pemerintahan pusat. Data yang diserahkan merupakan data PPLS tahun 2011.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti pada indikator kedudukan pengambilan keputusan. Dapat di analisis bahwa peran pemerintah pusat dalam program BLSM dalam menentukan penerima BLSM sangatlah besar. Pemerintah pusat melalui TNP2K melakukan tugas dalam pencacahan data yang dikirimkan oleh BPS menjadi DBT.

Sedangkan pemerintah daerah hanya sebagai penyedia keranjang data melalui BPS daerah. Instansi terkait yang terdapat di tingkat daerah hanya selaku pelaksana program, dan tidak termasuk dalam menentukan sasaran program.

Seharusnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih berkoordinasi lagi dalam penentuan sasaran program agar dapat

menimalisir ketidaktepatan sasaran program.

Dalam hal ini Grindle kembali menjelaskan betapa besarnya pengaruh dari kedudukan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Karena, hasil akhir dari kebijakan adalah kepuasan dari pelaksanaan yang menunjukkan keberhasilan dan memperkecil kesalahan agar, hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi pada masa yang akan datang. Namun, pada kenyataannya masalah ini sering terulang kembali pada masa yang akan datang. Salah satunya, pada pelaksanaan program BLSM pada tahun 2013.

b. Instansi yang terlibat

Setiap instansi yang terlibat dalam suatu program kebijakan pemerintah, memiliki peran yang berbeda. Pada indikator ini, instansi yang dimaksud adalah BPS, PT Pos, Dinas Sosial, dan Kelurahan.

Masing-masing instansi pelaksana program BLSM memiliki tugas yang berbeda. Melalui wawancara peneliti dengan R1 adalah sebagai penyedia data, BPS diminta bantu oleh pemerintah pusat untuk *up dating* data.

Peran Dinas Sosial dapat dijelaskan melalui hasil wawancara penulis dengan R3 adalah sebagai dinas yang memonitoring

pelaksanaan program tersebut. Hasil wawancara peneliti dengan R4 adalah sebagai operator pembagian KPS dan pencairan dana. PT Pos ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat pencairan dana dari program P4S.

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan R2 dapat disimpulkan bahwa, “Verifikasi data dilakukan di kelurahan, verifikasi yang dilakukan hanya kepada penerima BLSM yang tidak ditemukan dilapangan, karena pindah, meninggal, dan tanpa keterangan.”

Melalui hasil observasi di lapangan yang penulis lakukan, masing-masing instansi kurang memahami program BLSM. Hal ini terlihat ketika peneliti ingin mencari informasi mengenai program BLSM ke masing-masing instansi. Peneliti menggali informasi awal melalui kelurahan, namun informasi tidak didapatkan di kelurahan. Pihak kelurahan memberi saran untuk menanyakan program BLSM kepada pemiliki program dalam hal ini Dinas Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, dapat di analisis bahwa instansi yang terkait memiliki tugas dan peranya masing-masing. Instansi-instansi terkait hanya menjalankan tugas yang diberikan.

Namun, instansi kurang memahami secara keseluruhan peran dari masing-masing instansi. Salah satunya, pihak kelurahan yang tidak mengetahui adanya KPS pengganti yang diberikan kepada rumah tangga yang sudah tidak tergolong miskin. Semuanya ini masih berkaitan dengan kurangnya koordinasi dan sosialisasi yang ada.

c. Kepatuhan dan responsivitas

Kepatuhan dari instansi pelaksana dan kelompok sasaran dalam mengikuti aturan yang berlaku dalam program sangat perlu diperhatikan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok sasaran sebagai penerima program harus dipenuhi. Responsivitas dari kelompok sasaran terhadap kebijakan program dan pelaksanaan menjadi perhatian oleh penerima.

Pelaksana merespon baik program BLSM, namun pelaksana menilai bahwa program bantuan tunai kurang efektif dan kurang mendidik. Selain pelaksana, kepatuhan penerima juga sama pentingnya. Pada saat observasi di lapangan, peneliti menemukan ketidakpatuhan dari penerima yang dikategorikan mampu yang menerima program BLSM. Mereka yang sudah mampu,

tidak mengembalikan KPS yang sudah diterimanya, tetapi masih tetap mengambil bantuan yang ada.

Hasil analisis penulis terhadap kepatuhan dari pelaksana dan kelompok sasaran secara keseluruhan terhadap aturan pelaksanaan program dinilai cukup, namun masih ditemukannya penerima yang tergolong mampu tetapi tidak mengembalikan KPS. Sedangkan responsivitas penerima sangat baik, bantuan ini akan memerikan manfaat bagi penerima.

3) Hasil Kebijakan

Hasil yang ditimbulkan berupa dampak, dampak kebijakan terdiri atas dampak positif dan dampak negatif dari program.

Wawancara yang penulis lakukan dengan R5, R6, R7, R8, dan R9, menunjukkan program BLSM sangat membantu mereka.

“Kesimpulan dari wawancara menunjukkan mereka sangat senang karena pemerintah masih memperhatikan mereka. Naiknya harga BBM membuat bahan kebutuhan lainnya juga naik, dan bantuan BLSM sangat membantu mereka”.

Berdasarkan observasi lapangan dan hasil wawancara yang peneliti lakukan, maka dapat dilakukan analisis. Secara keseluruhan dampak positif yang dirasakan oleh sasaran

program adalah terbantunya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan setelah kenaikan BBM.

Ketika masyarakat merasa khawatir dengan kenaikan BBM yang diiringi kenaikan harga kebutuhan lainnya, subsidi yang diberikan berupa uang sebesar Rp .300.000 dapat membantu mereka. Program BLSM menggunakan data tahun 2011, data yang digunakan dengan waktu pelaksanaan program menimbulkan kemungkinan perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam program ini dianggap sebagai masalah utama yang mengakibatkan, adanya penerima bantuan yang sudah mampu secara ekonomi dan adanya masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi tidak menerima bantuan.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan R1 adalah sebagai berikut :

“Rentan waktu yang terlalu lama antara tahun 2011 dan 2013 menurut saya adalah masalah utama. Persiapan kita di tahun 2011 digunakan tahun 2013 sudah hampir usung, 70% data sih bisa dipertanggungjawabkan 30% ya sudah berantakan, ada yang sudah tidak miskin, miskinnya bertambah”.

Penentuan sasaran program BLSM dilakukan oleh pemerintah pusat. Melalui data yang dikirimkan oleh BPS ke TNP2K, pemerintah pusat memotong 25% dari data yang ada menjadi penerima BLSM. Penentuan sendiri dilakukan langsung dipusat, dan tidak melibatkan pemerintahan daerah.

Kondisi sosial yang sudah berdeba, pengambilan keputusan dilakukan pemerintah pastinya akan menimbulkan salah sasaran.

Selain itu, ketika observasi lapangan peneliti juga menemukan seorang guru dengan perekonomian yang mencukupi yang menerima BLSM. KPS yang sudah diterimanya tidak dikembalikan lagi kepada pihak kelurahan. Hal ini sendiri di utarakan oleh ketua RT setempat yang peneliti temui di lapangan.

Adanya kecemburuan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Masyarakat yang tingkat perekonomiannya sama, satu pihak menerima BLSM sedangkan satu pihak lainnya tidak menerima BLSM. Kecemburuan terjadi ketika pihak yang tidak menerima program merasakan iri dengan pihak yang menerima BLSM. Pihak yang tidak menerima pada akhirnya melaporkan kepada ketua RT, karena pihak RT tidak bisa memberikan alasan yang pasti, merekapun akhirnya mendatangi kelurahan. Pihak kelurahan tidak bisa memberikan jalan keluar yang pasti, karena penentuan ini sudah keputusan pemerintah pusat.

Dari segi manfaat, program BLSM membantu masyarakat, namun memberikan bantuan kepada masyarakat akan membuat masyarakat tidak mandiri. Mendidik masyarakat

untuk selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan tersebut, dapat dilakukan analisis bahwa pelaksanaan program BLSM memberikan dampak yang positif terhadap daya beli masyarakat karena kenaikan BBM. Meskipun terdapat kecemburuan sosial dilingkungan masyarakat, hal tersebut tidak menjadi persoalan yang besar.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang penerima program BLSM yang terdiri dari tiga kelompok pengamatan, pertama pengamatan terhadap isi kebijakan yang berhubungan dengan penerima program, kedua pengamatan terhadap konteks implementasi program, dan ketiga terhadap dampak kebijakan.

Secara garis besar, pelaksanaan program BLSM di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat berjalan dengan lancar. Masalah utama yang peneliti temukan adalah penggunaan data tahun 2011 yang memungkinkan terjadinya perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat pada tahun 2013. Hal ini menyebabkan terdapatnya masyarakat miskin tidak mendapatkan bantuan dan masyarakat yang sudah mampu mendapatkan bantuan.

Adapun kesimpulan dari masing-masing pengamatan adalah sebagai berikut :

1) Isi kebijakan

Dimensi yang termuat dalam isi kebijakan menunjukkan bahwa penerima BLSM merupakan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan data PPLS 2011. Namun, masih ditemukannya masyarakat yang sudah mampu menerima BLSM di Kelurahan Kampung Baru. Manfaat dari BLSM dapat dirasakan oleh masyarakat penerima dalam membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun ada masyarakat yang menggunkan bantuan untuk membayar uang sekolah, tambahan modal usaha, dan membayar hutang.

Perubahan yang dirasakan masyarakat penerima BLSM terlihat ketika kenaikan BBM masyarakat mampu mempertahankan daya beli. Akan tetapi, daya beli masyarakat akan kembali menurun setelah program BLSM berakhir. Kedudukan pengambilan keputusan dalam program BLSM melalui pemerintah pusat. Hal ini akan terjadinya kesenjangan dengan kondisi masyarakat sampai tingkat yang paling bawah, karena pemerintah tidak dilibatkan dalam penentuan sasaran program BLSM.

Koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan masih kurang, sosialisasi tidak dilakukan secara formal melainkan hanya menggunakan lembaran sosialisasi. Akibatnya adanya masyarakat yang kurang memahami pelaksanaan program BLSM. Sumberdaya yang dilibatkan dalam pembagian KPS masih kurang, petugas PT Pos melakukan perekrutan tenaga pembantu dari luar dalam pendistribusian KPS kepada penerima.

2) Konteks implementasi

Dalam dimensi ini dapat disimpulkan bahwa, pemerintah pusat pemegang kekuasaan penuh terhadap program BLSM. Pemerintah daerah dalam penentuan sasaran hanya sebagai penyedia keranjang data. Kurangnya peran pemerintah daerah dalam program ini, membuat pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi permasalahan penerima BLSM.

Banyaknya instansi yang terlibat, membuat semakin sulitnya dalam implementasi program yang sifatnya nasional. Instansi kurang memahami secara keseluruhan peran dari masing-masing instansi. Salah satunya, pihak kelurahan yang tidak mengetahui adanya KPS pengganti yang diberikan kepada rumah tangga yang sudah tidak tergolong miskin.

Kepatuhan dari kelompok sasaran secara keseluruhan terhadap aturan pelaksanaan program dinilai cukup, namun masih ditemukannya penerima yang tergolong mampu tetapi tidak mengembalikan KPS. Sedangkan responsivitas penerima sangat baik, bantuan ini akan memberikan manfaat bagi penerima.

3) Hasil kebijakan

Dimensi dari hasil kebijakan terlihat dari dampak yang ditimbulkan. Dengan data yang ada, penyaluran BLSM tetap berjalan dengan baik. Namun, penggunaan data yang tidak terbaru, menimbulkan terjadinya salah sasaran penerima program. Sehingga terjadinya gejolak sosial dilingkungan masyarakat. Masyarakat yang tidak menerima BLSM merasa iri terhadap masyarakat yang menerima BLSM.

Selain membantu masyarakat, pemberian uang tunai bisa menjadikan masyarakat sebagai peminta dan tidak mendidik masyarakat. Masyarakat akan selalu mengharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Hal ini terlihat dari harapan masyarakat agar bantuan yang diberikan dapat berlangsung lama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Ali, Faried, 2012, *Studi Analisa Kebijakan, Makasar*: PT Refika Aditama.
- Chamsyah, Bachtiar, 2006, *Teologi Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: RMBOOKS.
- Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Grindle, Merilee, 1980, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, New Jersey: University Press.
- Keban, Yeremias T, 2008, *Enam Dimensi Strategi administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gavamedia.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2013, *Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak 2013*, Jakarta.
- _____ 2013, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat*, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant, 2012, *Public Policy*, Jakarta: PT GRAMEDIA
- Pasolong, Harbani, 2013, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Santosa, Panjdi, 2008, *Administrasi Publik*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P. 2007, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: ALFABETA Jakarta: Rineka Cipta.
- Subarsono, 2010, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi, 2010, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Truen RTH Bandung
- Wahab, Solichin Abdul, 2004, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- _____ 2012, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi, 2012, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.

Skripsi, Tesis dan Jurnal

- Hadiyanti, 2006, Kemiskinan dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Volume 2. No.1 Tahun 2006:
34

Iqbal, Hasbi, 2008, "Implementasi Kebijakan Program bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus". *Tesis.*, Program Studi Magister Ilmu administrasi, Konsentrasi Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro.

Lembaga Penelitian SMERU, 2011, "Kajian Cepat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerimaan Program BLT 2005 di Indonesia", Laporan Penelitian.

Syawie, Mochamad. 2011. Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial, Vol. 16 No. 03 Tahun 2011: 217.

Lubis, Sutan Tolang, 2007, "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan". *Skripsi.* Program Studi Pembangunan, Universitas Sumatera Utara

Dokumen dan Undang-Undang

Dinas Sosial Provinsi. 2013. Rekapitulasi Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) Seluruh Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 "Tentang Sosialisasi kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar"

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 451/3150/SJ Tahun 2013, "Tentang Pelaksanaan Pembagian kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat"

Kelurahan Kampung Baru.2013. Kriteria Miskin Berdasarkan Statistik BPS.

_____Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desember 2013.

PT POS Indonesia. 2013. Laporan Kinerja Pembayaran BLSM Tahun 2013 Tahap 1 dan Tahap 2.

_____ Laporan Rekapitulasi Kinerja Pembayaran BLSM tahun 2013 Tahap 1 dan Tahap 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013, "Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2012 Tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013"